

# IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA DIVISI KAPAL PERANG PT.PAL INDONESIA

**Istiqomah Muji Nisa'a**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Email: [istiqomahnisaa@mhs.unesa.ac.id](mailto:istiqomahnisaa@mhs.unesa.ac.id)

**Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Email: [tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

## Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam mendukung pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pemerintah menerbitkan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan. Salah satunya adalah PT.PAL Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri galangan kapal dengan resiko pekerjaan tinggi, membutuhkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam mengimplementasikan kegiatan operasional sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada divisi kapal perang PT.PAL Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model implementasi dari Edward III terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pendumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada divisi kapal perang PT.PAL Indonesia sudah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dapat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi membuktikan bahwa Informasi mengenai program K3 sudah disampaikan kepada seluruh karyawan melalui divisi dan departemen yang tergabung didalamnya, dengan cara sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan. Dari aspek sumber daya terdiri dari Sumber daya manusia pada divisi kapal perang cukup memadai dan kompeten karena sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi, Sumber daya anggaran yang digunakan sering mengalami hambatan dalam proses pengajuannya yaitu terkendala persetujuan pimpinan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pendistribusian Alat Pelindung Diri, maupun kendala dari pihak suplier. Sumber daya peralatan terdiri dari mesin-mesin produksi, alat pelindung diri, dan alat pemadam kebakaran pada setiap unit kerja. Sumber daya informasi dan wewenang terkait dengan keputusan yang diambil oleh kepala biro K3LH pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Aspek disposisi, terdiri dari pengangkatan pegawai yang dilakukan harus sesuai dengan kualifikasi, serta Insentif berupa gaji pokok dan tunjangan bahaya. Aspek struktur birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi. Sop yang ada antara lain: SOP Alat pelindung diri, Sop Kesiagaan dan tanggap darurat, serta SOP setiap bidang pekerjaan yang tercantum dalam buku petunjuk umum K3LH.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

## Abstract

Occupational Safety and Health is all activities to guarantee and protect the safety and health of workers through efforts to prevent work accidents and work-related diseases. In supporting the implementation of the Occupational Safety and Health program the government issued PP No. 50 of 2012 concerning occupational safety and health management systems that must be implemented by all companies. One of them is PT. PAL Indonesia as a State-Owned Enterprise (BUMN) company engaged in shipyard industry with high employment risk, requiring Occupational Safety and Health programs in implement daily operational activities. The purpose of this study was to describe the implementation of the Occupational Safety and Health program at the PT. PAL

Indonesia warship division. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of research using the implementation model of Edward III consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The source data collection technique in this study uses Purposive Sampling techniques. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study describe that the implementation of the Occupational Safety and Health program at the PT. PAL Indonesia warship division has been carried out to the maximum. This can be seen from the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From the communication aspect, it proves that Information about the K3 program has been delivered to all employees through the divisions and departments incorporated in it, by means of socialization and training carried out. From the aspect of resources consisting of human resources in the warship division is quite adequate and competent because it is in accordance with their fields. However, the budget resources used often experience obstacles in the submission process, which is constrained by leadership approval so that it takes a long time to distribute Personal Protective Equipment, as well as constraints from the supplier. Equipment resources consist of production machines, personal protective equipment, and fire extinguishers in each work unit. Information resources and authority related to decisions taken by the head of the K3LH bureau at the time of workplace accidents. The disposition aspect, consisting of the appointment of employees carried out must be in accordance with the qualifications, as well as incentives in the form of basic salaries and hazard benefits. Aspects of bureaucratic structure consist of SOP and fragmentation. The available SOPs include: SOP Personal protective equipment, Sop Preparedness and emergency response, and SOP for each field of work listed in the K3LH general guidebook.

Keywords: Implementation, Program, Occupational Safety and Health

## PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 1). Upaya pencegahan kecelakaan kerja tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko penyakit yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, luka-luka, serta kerugian yang bersifat fisik maupun materil yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

Kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga, atau didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirilah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat. (Silalahi,1995).

Secara umum masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih sering diabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya angka kecelakaan kerja yang terjadi

setiap tahun. Berikut adalah jumlah angka kecelakaan kerja tahun 2015-2017. Tahun 2015 mencapai 110.285 jiwa, tahun 2016 mencapai 105.182 jiwa, dan tahun 2017 periode Januari-Agustus mencapai 80.392 jiwa. (<http://www.depkes.go.id>)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, akan tetapi jika di analisis dari jumlah angka kecelakaan per tahun cenderung mengalami penurunan. Sejalan dengan semakin meningkatnya perusahaan maupun organisasi yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil, sehingga berdampak pada penurunan angka kecelakaan kerja yang signifikan pada tahun 2017. Berikut adalah data jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil (*zero accident*). Pada tahun 2016 berjumlah 848 perusahaan, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 901 perusahaan. (<http://www.depkes.go.id>)

Mengenai hal tersebut membuat pemahaman dan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi organisasi maupun perusahaan. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka semua perusahaan wajib untuk melaksanakannya termasuk BUMN. PT.PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang industri

galangan kapal, menjadi salah satu industri strategis, khususnya yang memproduksi mata laut sebagai sistem pertahanan, keberadaannya memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri kelautan nasional. ([www.pal.co.id](http://www.pal.co.id)).

Pentingnya BUMN ini menarik peneliti adalah produk yang dihasilkan dari PT.PAL Indonesia sudah dikenal didunia internasional, dibuktikan dengan adanya permintaan pemesanan dari berbagai negara. Sebagaimana dilansir pada media (<https://nasional.kompas.com>) saat ini PT.PAL telah masuk pasar Asia Tenggara yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Afrika. Sebelumnya, PT PAL juga telah sukses melakukan ekspor perdana kapal perang ke Filipina. Bidang usaha yang ada juga bermacam-macam diantaranya:

1. Memproduksi kapal perang dan niaga
2. Memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal
3. Rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien

Sebagai salah satu BUMN yang besar, tentu tidak mudah bagi PT.PAL untuk dapat mengimplementasikan K3 dalam operasional kegiatan sehari-hari. Terutama banyak proyek besar baik dalam negeri maupun luar negeri yang beresiko terjadinya kecelakaan kerja. Berikut adalah data kecelakaan kerja PT.PAL Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 15 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 8 orang (Dokumen PT.PAL Indonesia), dengan jenis kecelakaan kerja secara umum yaitu tergores, terjepit, dan terjatuh. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mbak Vina selaku pegawai Biro K3LH yang menyampaikan bahwa:

“resiko pekerjaan di PT.PAL Indonesia ini tergolong tinggi, dengan jenis kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi selama ini adalah tergores benda tajam, terjepit, dan terjatuh dari ketinggian, tidak ada yang sampai parah maupun meninggal dunia, hanya kecelakaan yang ringan saja. hal itu pun juga jarang terjadi”. (Vina, wawancara 10 September 2018)

Oleh karena itu, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengingat banyak

kegiatan K3 yang dijalankan dan setiap bidang usaha yang ada juga sangat beresiko. Akan tetapi, hal tersebut tetap menjadi perhatian utama perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber Luhul Mahfud yang bertanggung jawab pada K3 bahwa:

“PT.PAL ke depannya akan selalu meningkatkan program K3 dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kerja, dan pada saat ini PT.PAL juga masuk ke dalam kategori zero accident, yang dimaksudkan zero accident yaitu bukan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan masih tetap terjadi hanya saja resiko yang ditimbulkan kecil dan masih bisa teratasi dalam waktu 2 X 24 jam harus bisa masuk kerja kembali, dan diharapkan perhatian terhadap keselamatan lebih ditingkatkan, dikarenakan masih banyak perlengkapan APD (alat pelindung diri ) yang ingin diperbaiki, tetapi tidak segera diperbaiki akibat dari lambatnya pencairan dana”. (Luhul, wawancara 10 September 2018).

Selain itu, dibuktikan dengan faktor keselamatan kerja jika di tempat lain banyak diabaikan, sebagaimana dilansir dari media (<https://ekonomi.bisnis.com>) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia terpantau masih minim, sehingga berdampak pada tingginya resiko kecelakaan kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan (kemnaker) jumlah perusahaan yang menerapkan dan menerima penghargaan SMK3 pada tahun 2017 mencapai 1.221 perusahaan atau meningkat dari 2016 yang mencapai 722 perusahaan dan 2015 yang mencapai 635 perusahaan.

Dari data tersebut menunjukkan adanya kenaikan perusahaan yang menerapkan dan menerima penghargaan SMK3. Namun, jumlah itu terbilang sangat sedikit atau sebesar 10% dari total perusahaan yang ada di Indonesia, dengan sektor konstruksi paling banyak terjadinya kecelakaan kerja, akan tetapi PT.PAL

justru mendapat sebaliknya yaitu dengan diperolehnya sertifikasi OHSAS 18001 : 2007 tentang standar internasional manajemen keselamatan kerja yang terdiri dari manual keselamatan kerja, prosedur keselamatan kerja, instruksi kerja, keselamatan kerja, dan formulir-formulir sebagai catatan yang membuktikan bahwa perusahaan sudah menerapkan semua persyaratan standar OHSAS 18001 : 2007 yang berlaku mulai 1 Oktober 2015- 15 September 2018.

Setelah diraihnya sertifikasi tersebut, bukan berarti perhatian terhadap K3 di PT.PAL ini berhenti. Perhatian terhadap K3 di PT.PAL justru terus berlanjut. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program K3 oleh PT.PAL Indonesia, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) setiap bidang pekerjaan yang tercantum dalam buku petunjuk Umum pelaksanaan K3. Misalnya dalam pengoperasian *Crane*, maka ada SOP yang harus dilaksanakan yaitu bagan kapasitas muat yang ditentukan, kecepatan operasi yang dianjurkan, dilarang melampaui batas daya muat, dan sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti memilih divisi kapal perang karena kapal perang merupakan jenis kapal yang diproduksi oleh PT.PAL Indonesia dengan tingkat kerumitan lebih tinggi yaitu dilengkapi dengan pemasangan alat senjata yang lengkap, dibandingkan dengan kapal-kapal lain seperti kapal patroli cepat. Alasan lainnya yaitu saat ini proyek baru yang juga dikerjakan oleh divisi kapal perang adalah Kapal Cepat Rudal (KCR), yang mana pada saat pembuatan KCR sangat membutuhkan dukungan dari K3, baik dimulai dari tahap awal proses pembuatan kapal maupun sampai pada tahap akhir proses pembuatan kapal, mengingat resiko bahaya yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja akibat dari kegiatan produksi yang dilaksanakan. Kegiatan produksi tersebut antara lain proses *fabrikasi, assembly, erection, blasting* dan *painting, outfitting*, serta *test* dan *trial*.

Dari semua tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan, membuat perusahaan BUMN PT.PAL Indonesia harus tunduk dan patuh

terhadap Undang-undang tentang keselamatan kerja, dalam pelaksanaan pekerjaan setiap harinya. Selain UU juga ada Peraturan Pemerintah tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Ketika 2 peraturan tersebut dijalankan dengan taat, maka dalam perspektif George C. Edward pelaksanaan program K3 di Divisi Kapal Perang PT.PAL Indonesia akan menjadi berhasil yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, PT.PAL Indonesia membutuhkan kesiapan komunikasi, sumber daya yang mendukung, disposisi yang dipahami oleh semua pihak, serta struktur birokrasi yang jelas.

Berdasarkan pemaparan diatas, mengenai gambaran singkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada divisi kapal perang PT.PAL Indonesia. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA DIVISI KAPAL PERANG PT.PAL INDONESIA”**.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. Lokasi penelitiannya yaitu divisi kapal perang PT.PAL Indonesia. Fokus penelitian menggunakan model implementasi dari Edward III (1980) terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun subjek penelitiannya adalah kepala biro K3LH divisi kapal perang, dokter perusahaan, pegawai biro K3LH divisi kapal perang, kepala bengkel erection, dan kepala gudang. Teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) merupakan program nasional yang dibuat oleh pemerintah guna untuk melindungi tenaga

kerja. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Melalui Peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib dilaksanakan diseluruh lingkungan kerja, yang merupakan hak dari setiap pekerja, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja dalam kondisi selamat, aman dan sehat. Dalam hal ini PT.PAL Indonesia bertindak sebagai implementator program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), karena setiap kegiatan produksi yang dilakukan sangat beresiko terjadinya kecelakaan kerja, sehingga seluruh divisi yang tergabung didalamnya harus melaksanakan program K3. Termasuk Divisi Kapal Perang yang saat ini sangat membutuhkan dukungan K3 dalam mengerjakan project Kapal Cepat Rudal 60 m.

Dari banyaknya proses produksi yang dilakukan, maka implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada divisi kapal perang harus selalu diutamakan. Dimana dalam pelaksanaannya harus ada unsur-unsur implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (2006:26) sebagai berikut:

a. Unsur Pelaksana

Dalam implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Divisi Kapal Perang yang menjadi pelaksana adalah dokter perusahaan, tim penanggulangan keadaan darurat, tim kesehatan, tim keamanan dan departemen dukungan produksi. Dalam departemen dukungan produksi terdapat unit kerja struktural tingkat biro yang dipimpin kepala Biro SDM dan K3LH yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 pada Divisi Kapal Perang PT.PAL Indonesia. .

b. Program yang dilaksanakan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikaji menggunakan model implementasi dari George C. Edward III dengan 4 indikator berikut ini:

1) Komunikasi

Menurut Widodo (2009:97) Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam Implementasi program. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Divisi Kapal Perang komunikasi yang dijalankan sudah cukup baik, yaitu dengan

melakukan *moorning briefing* atau *toolbox meeting* setiap pagi yang dipimpin oleh manajer, kepala bengkel, kepala biro mengenai apa yang dikerjakan pada hari ini dan juga tentang aspek-aspek keselamatan.

Selain itu juga dilaksanakan *safety meeting* yang dilakukan di *corporate* atau divisi kawasan, dengan dihadiri oleh seluruh pegawai K3LH pada seluruh divisi untuk membahas program K3. Misalnya kendala-kendala yang dihadapi mengenai keterlambatan APD dan *trend* kecelakaan yang sedang naik, dan sebagainya.

Menurut pendapat George C. Edward III ada 3 poin penting dalam komunikasi yaitu:

- a) Transmisi, Informasi mengenai program K3 disampaikan oleh pegawai biro K3LH kepada karyawan produksi melalui sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan pada saat di ruang rapat, sedangkan pelatihan mengenai tanggap darurat dilakukan secara langsung di luar ruangan.
  - b) Kejelasan, Informasi mengenai program K3 disampaikan oleh pegawai biro K3LH dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilakukan praktek langsung sehingga mempermudah karyawan dalam memahami materi sosialisasi.
  - c) Konsistensi, Dalam mendukung implementasi program K3 terkait dengan waktu pelaksanaan dan pelatihan sudah dilakukan secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya jadwal tiap-tiap event dan pelatihan yang dilakukan setiap tahun.
- 2) Sumber daya, ada 4 poin penting dalam sumber daya yaitu:
- a) Sumber daya manusia, pada divisi kapal perang PT.PAL Indonesia adalah pegawai biro K3LH yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya program K3 kepada seluruh karyawan.
  - b) Sumber daya anggaran, alokasi anggaran K3 yang disediakan PT.PAL Indonesia sudah cukup memadai dibuktikan dengan tersedianya peralatan yang memadai, serta persediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang didapatkan individu sudah berdasarkan SOP yang ada, akan tetapi pada saat proses pengajuan seringkali terdapat hambatan yaitu terkendala

persetujuan pimpinan maupun dari suplier, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat memberikan efek negatif terhadap pelaksanaan pekerjaan.

- c) Sumber daya Peralatan, dalam implementasi program K3 pada divisi kapal perang telah tersedia peralatan yang memadai berupa mesin-mesin, fasilitas Dok gali 20.000 DWT, Ship Lift 1.500 TLC, Alat Pelindung Diri (APD), dan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) pada setiap unit kerja.
- d) Sumber daya informasi dan wewenang, informasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap bidang pekerjaan yang harus dipahami oleh semua karyawan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Wewenang terkait dengan keputusan yang diambil oleh kepala biro K3LH pada saat terjadinya kecelakaan kerja.
- 3) Disposisi, ada 2 poin penting dalam disposisi yaitu:
  - a) Rekrutmen, pengangkatan pegawai biro K3LH harus didukung dengan kualifikasi yang sesuai yaitu latar belakang pendidikan K3 atau paling minim adalah memiliki pengalaman.
  - b) Insentif, yang diberikan kepada karyawan pada divisi kapal perang berupa gaji pokok dan tunjangan bahaya, sebagai bentuk ganti rugi dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.
  - 4) Struktur Birokrasi, ada 2 poin penting dalam struktur birokrasi yaitu:
    - a) Standar Operasional Prosedur (SOP), jenis SOP yang ada bermacam-macam yaitu SOP APD, SOP kesiagaan dan tanggap darurat, serta SOP setiap bidang pekerjaan yang sudah diatur dalam buku petunjuk umum pelaksanaan K3.
    - b) Fargmentasi, koordinasi pada divisi ini cukup baik, hal ini dapat dilihat pada saat terjadinya kecelakaan kerja semua karyawan sudah mengetahui tugas dan fungsinya yaitu ada tim penanggulangan darurat, tim keamanan, tim evakuasi, dan tim kesehatan.
- c. *Target group* atau Kelompok sasaran Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa *target group* yaitu “sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”. Dalam penelitian ini *target group* yang

dimaksud adalah seluruh karyawan yang bekerja pada proses produksi. Karyawan tersebut berjumlah 255 orang terbagi atas karyawan PKWTT atau Organik 138 orang, Sedangkan, untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berjumlah 117 orang.

## PENUTUP

### SIMPULAN

Kesimpulan secara keseluruhan adalah bahwa implementasi program K3 pada divisi kapal perang sudah dilakukan secara maksimal, dengan melibatkan semua pihak didalamnya. Program tersebut sudah dipahami oleh seluruh karyawan pada divisi kapal perang melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pegawai biro K3LH, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan terkait dengan persetujuan pimpinan dan suplier dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Kelompok sasaran program ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada proses produksi.

### SARAN

1. Mengingat pentingnya pelaksanaan program K3, maka pengajuan anggaran untuk kegiatan APD harus lebih diprioritaskan, untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
2. Sering melakukan himbauan terkait dengan keselamatan kerja setiap hari. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun belum pernah terjadi kecelakaan yang membahayakan sampai menghilangkan nyawa, tetapi kecelakaan tersebut masih terjadi.
3. Perlu adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada tenaga kerja yang masih kurang kesadaran diri dalam pemakaian APD dalam lingkungan kerja.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen penguji

4. M. Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

[https://www.pal.co.id/product\\_&\\_solution?lang=ina](https://www.pal.co.id/product_&_solution?lang=ina)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/12261411/pt-pal-ekspor-kapal-perang-ke-asia-tenggara-hingga-afrika>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190115/12/878983/penerapan-standar-keselamatan-kerja-di-indonesia-belum-optimal>

#### DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis kebijakan publik (konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik)*. Malang: Bayumedia.

Silalahi, Bennet N.B . 1985 . *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja* . Jakarta: Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (IPPM) dan PT Pustaka Binaman Pressindo.

Sugiyono, M. 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truten TRH.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. *PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100. Jakarta : Sekretariat Negara.

<http://www.depkes.go.id/article/view/18012200004/menaker-hanif-canangkan-peringatan-bulan-k3-nasional-2018.html>